

# Analisis Perlakuan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara

Nur Fatimah

Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka

e-mail: [nurfatimahhh22@gmail.com](mailto:nurfatimahhh22@gmail.com)

## Abstrak

Studi berikut memiliki tujuan untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi lingkungan di RSUD H.M. Djafar Harun di Kabupaten Kolaka Utara. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif di Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun sebagai lokasi penelitian. Pegawai dari departemen perencanaan, keuangan, dan kesehatan lingkungan menjadi informan dalam penelitian ini. Data sekunder penelitian ini berasal dari catatan keuangan rumah sakit, sedangkan data primer diperoleh dari wawancara. Menurut hasil studi, RSUD H.M. Djafar Harun telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.465.200.000 untuk biaya lingkungan. Identifikasi biaya lingkungan untuk pengelolaan limbah meliputi biaya perawatan kebersihan, Biaya Pengangkutan Limbah, Biaya Uji Limbah Cair Dan Biaya Retribusi Sampah/Iuran Sampah. Dasar pengukuran yang digunakan yaitu menggunakan biaya historis dengan satuan rupiah. Biaya-biaya tersebut diakui sebagai biaya barang dan jasa. Biaya lingkungan disajikan pada pada laporan operasional dan laporan realisasi anggaran bersama-sama dengan akun-akun yang lainnya yang serumpun. Untuk pengungkapan biaya lingkungan pihak rumah sakit berupaya sebaik mungkin untuk mengungkapkannya. Karena belum adanya standar khusus terkait dengan pengungkapan biaya lingkungan maka pihak rumah sakit masih mengungkapkan biaya lingkungan dalam pos yang lebih besar yaitu dalam pos biaya barang dan jasa.

**Keyword: Perlakuan Akuntansi Lingkungan, Biaya Lingkungan, Rumah Sakit**

## Abstract

*The following study aims to evaluate the treatment of environmental accounting at RSUD H.M. Djafar Harun in North Kolaka Regency. This research was conducted using a qualitative descriptive approach at the H.M. Regional General Hospital. Djafar Harun as the research location. Employees from the planning, finance and environmental health departments were informants in this research. The secondary data for this research came from hospital financial records, while the primary data was obtained from interviews. According to the study results, RSUD H.M. Djafar Harun has allocated a budget of IDR 465,200,000 for environmental costs. Identification of environmental costs for waste management includes cleanliness maintenance costs, waste transportation costs, liquid waste testing costs and waste levy/trash fees. The measurement basis used is historical costs in rupiah units. These costs are recognized as costs of goods and services. Environmental costs are presented in operational reports and budget realization reports together with other related accounts. To disclose environmental costs, the hospital does its best to disclose them. Because there are no specific standards related to disclosing environmental costs, hospitals still disclose environmental costs in a larger item, namely in the cost of goods and services item.*

**Keywords: Environmental Accounting Treatment, Environmental Costs, Hospital**

### 1. PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai lingkungan bukan lagi merupakan suatu hal yang baru; permasalahan tersebut menjadi semakin menarik untuk diteliti seiring dengan kemajuan era industri [1]. Lingkungan adalah bagian penting dari kehidupan dan terus menjadi perdebatan di berbagai tingkatan. Perubahan iklim menjadi topik utama dalam pertemuan tahunan WEF 2020 di Davos, Swiss [2].

Rumah sakit sebagai institusi atau lembaga yang bergerak dalam bidang Kesehatan tentu memiliki peran yang cukup besar dan signifikan dalam menjaga lingkungan, karena operasionalnya rumah sakit menghasilkan limbah medis yang tergolong kedalam limbah berbahaya dan apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik, maka dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan. Sebagai institusi yang berperan dalam menjaga kelestarian lingkungan, rumah sakit juga memiliki kewajiban untuk melakukan kegiatan pengelolaan limbah medis hasil kegiatan operasionalnya guna menjaga kelestarian lingkungan [3].

Berdasarkan profil kesehatan Indonesia, Menurut Badan Pusat Statistik [4], di Indonesia terdapat sebanyak 3.155 rumah sakit, dimansa sebanyak 2.636 dan 519 provinsi yang memiliki jumlah rumah sakit terbanyak yaitu Provinsi Jawa Timur sebanyak 423 unit. Namun sangat disayangkan dari banyaknya rumah sakit yang tersebar di Indonesia masih banyak yang belum melakukan pengelolaan limbah medis.

Akuntansi lingkungan merupakan aspek tanggung jawab sosial dalam akuntansi yang berkembang dari akuntansi sosial. Tujuan akuntansi lingkungan untuk mendeteksi, mengenali, mengukur, menyajikan, dan mengomunikasikan informasi lingkungan. Akuntansi lingkungan harus digunakan dalam pengelolaan limbah rumah sakit untuk mendukung kegiatan operasional dan mengontrol tanggung jawab rumah sakit [5].

Pedoman akuntansi saat ini belum mengatur penggunaan akuntansi lingkungan di Indonesia. Menurut Megananda [6], di Indonesia, praktik pengungkapan akuntansi lingkungan masih belum efisien karena belum adanya regulasi. Pencatatan biaya lingkungan masih bersifat sukarela dan berada di luar cakupan standar akuntansi keuangan. Akan

tetapi menurut Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2019 pasal 10 Tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit menyebutkan bahwa: “Dalam menyelenggarakan kesehatan lingkungan, rumah sakit wajib melakukan pencatatan dan pedata terkait pengelolaan lingkungan termasuk hasil inspeksi kesehatan lingkungan”.

Dalam hal pengakuan biaya lingkungan, masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum benar-benar mengakui. Meskipun beberapa perusahaan telah menerapkan praktik operasional yang ramah lingkungan, praktik akuntansi mereka, khususnya terkait biaya lingkungan, masih belum optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih mendalam mengenai perlakuan akuntansi biaya lingkungan, meliputi identifikasi, pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan. Fokus penelitian ini adalah pada perusahaan jasa.

Tabel 1 Biaya lingkungan di rumah sakit

BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)				
RUMAH SAKIT H.M. DJAFAR HARUN				
KABUPATEN KOLAKA UTARA				
IV. LAPORAN OPERASIONAL				
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023				
Dengan Angka Perbandingan Untuk Tahun 2022				
(Dinyatakan Dalam Rupiah, Kecuali Dinyatakan Lain)				
URAIAN	No. Calk	TAHUN 2023	TAHUN 2022	
<b>Pendapatan</b>				
Pendapatan usaha dari jasa layanan	3b.1	xxx	xxx	
Pendapatan APBD	3b.2	xxxx	-	
Pendapatan Hibah	3b.3	-	-	
Pendapatan Usaha lainnya	3b.4	xxx	xxx	
<b>Jumlah Pendapatan</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	
<b>Beban</b>				
<b>Beban Layanan</b>	3b.5			
Beban Pegawai			-	
Beban pemakaian bahan		xxx	xxx	
Beban Jasa layanan		xxx	xxx	
Beban Pelatihan		-	-	
Beban barang		xxx	-	
Beban pelayanan lain-lain		-	-	
<b>Jumlah beban layanan</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	
<b>Beban umum &amp; administrasi</b>	3b.6			
Beban Pegawai		xxx	-	
Beban Jasa		-	-	
Beban Pemeliharaan		xxx	xxx	
Beban persiapan		-	-	
Beban perjalanan dinas		xxx	xxx	
Beban Penyusutan		xxx	xxx	
Beban Amortisasi		xxx	xxx	
<b>Jumlah Beban umum &amp; administrasi</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	
<b>Beban Lainnya</b>	3b.7			
Beban Bunga		-	-	
Beban Administrasi bank		-	-	
<b>Jumlah Beban Lainnya</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>Jumlah Beban</b>		<b>xxx</b>	<b>xxx</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS KEUNTUNGAN/KERUGIAN</b>	3b.8	<b>(xxx)</b>	<b>(xxx)</b>	
Keuntungan/Kerugian				
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS-POS LUAR BIASA</b>		<b>(xxx)</b>	<b>(xxx)</b>	
Penyetoran/penarikan kas daerah				
<b>SURPLUS/DEFISIT TAHUN BERJALAN DI LUAR PENDAPATAN</b>				
<b>APBD &amp; APBN</b>	3b.9	<b>(xxx)</b>	<b>(xxx)</b>	

Data tabel menunjukkan bahwa tidak ada data khusus tentang biaya lingkungan di rumah sakit. Data tersebut belum mencantumkan pengungkapan biaya lingkungan secara spesifik atau jelas dalam data keuangan induk perusahaan; sebaliknya, biaya-biaya ini dimasukkan dalam biaya sub-layanan dan biaya sub-administrasi & umum, mengikuti model penyajian normatif. Penulis bertujuan menyelidiki akuntansi biaya lingkungan di RSUD H.M. Djafar Harun, Kolaka Utara.

Berdasarkan permasalahan yang melatar belakangi, studi berikut melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perlakuan Akuntansi Lingkungan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H.M Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara”.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

### 1. Teori Legitimasi

Teori Legitimasi mengkaji hubungan antara korporasi dan masyarakat. Gagasan ini menyatakan bahwa organisasi kepatuhan terhadap norma-norma ini dapat meningkatkan legitimasi perusahaan. Menurut Ghozali & Chariri [7], landasan teori legitimasi adalah kontrak sosial antara bisnis dan masyarakat lokal tempat mereka menjalankan bisnis dan menggunakan sumber daya.

Akibatnya, legitimasi memberikan keuntungan yang mendukung keberlanjutan perusahaan. Selama beroperasinya korporasi, banyak perubahan akan terjadi selama masa berdirinya. Korporasi harus mengantisipasi perubahan ini agar selaras dengan norma dan cita-cita yang ditetapkan masyarakat sekitar, sehingga dapat mengamankan legitimasi [8].

### 2. Teori Stakeholder

Teori Stakeholder terkait dengan kepemilikan dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), karena perusahaan diharapkan bertindak bertanggung jawab terhadap pemangku kepentingan dan lingkungan. Pemegang saham besar diharapkan mengawasi operasi perusahaan untuk menjaga integritas terkait isu tersebut.

Individu, organisasi, komunitas, atau masyarakat secara keseluruhan atau sebagian yang memiliki hubungan dan kepentingan dengan suatu perusahaan dianggap sebagai pemangku kepentingan. Teori Pemangku Kepentingan, sebagaimana dikemukakan oleh Ghozali & Chariri [9], menyatakan bahwa suatu bisnis harus memberikan manfaat kepada semua pemangku kepentingannya, yang meliputi investor, kreditor, pelanggan, pemasok, pemerintah, masyarakat, analis, dan pihak terkait lainnya, selain melayani kepentingannya sendiri.

### 3. Lingkungan

Lingkungan hidup diartikan sebagai kesatuan ruang beserta semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di dalam lingkungan hidup manusia melakukan berbagai aktivitas sehari-hari untuk memenuhi kebutuhan hidupnya”.

### 4. Akuntansi Lingkungan

Pentingnya akuntansi lingkungan dalam menampilkan biaya lingkungan ditekankan oleh Badan Perlindungan Lingkungan AS (US EPA). Hal ini membantu para pemangku kepentingan untuk mendukung program yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan biaya sekaligus meningkatkan kualitas lingkungan. Akuntansi lingkungan dibagi menjadi dua bagian utama oleh US EPA. Pertama, akuntansi lingkungan berurusan dengan biaya "biaya pribadi" yang berdampak langsung pada seluruh perusahaan. Akuntansi lingkungan juga mencakup biaya yang terkait dengan orang, masyarakat, dan lingkungan yang terkait dengan perusahaan yang masih belum diperhitungkan [10].

Ikhsan [11] mendefinisikan akuntansi lingkungan sebagai identifikasi, pengukuran, dan alokasi biaya untuk pengambilan keputusan perusahaan, bersama dengan komunikasi hasil kepada pemegang saham perusahaan. Akuntansi lingkungan mengacu pada integrasi biaya lingkungan ke dalam metode akuntansi perusahaan atau entitas pemerintah. Biaya lingkungan mencakup kerugian finansial dan nonfinansial yang terjadi karena tindakan yang memengaruhi kualitas lingkungan.

### 5. Biaya Lingkungan

Menurut Ikhsan dan Arfan [11], biaya lingkungan adalah dampak finansial atau nonfinansial dari kegiatan bisnis yang berdampak pada lingkungan. Biaya lingkungan didefinisikan oleh Hansen-Mowen [12] sebagai biaya yang timbul akibat potensi terjadinya kualitas lingkungan yang tidak memadai. Untuk menjamin bahwa data bermanfaat bagi para pemangku kepentingan dan mendukung pengambilan keputusan serta evaluasi kinerja

yang terkait dengan kualitas lingkungan, biaya lingkungan harus dilaporkan secara terpisah.

#### 6. Tahap-Tahap Perlakuan Akuntansi Lingkungan

Perlakuan akuntansi biaya lingkungan bertujuan untuk mengalokasikan dan menyusun strategi pengelolaan akibat buruk yang berasal dari eksternalitas perusahaan, termasuk pencemaran limbah, pencemaran udara, pencemaran sosial, dan aspek merugikan lainnya. Organisasi harus mengembangkan rencana strategi untuk tahap pencatatan manajemen keuangan guna memastikan keberhasilan dan efisiensi pelaksanaan alokasi anggaran yang direncanakan. Kategorisasi dalam tahap analisis lingkungan, sebagaimana ditetapkan oleh Standar Akuntansi Keuangan (SAK), meliputi:

##### 1) Identifikasi

Penilaian biaya yang berkaitan dengan pengaruh eksternal terhadap operasi bisnis dimulai dengan identifikasi. SAK tidak secara langsung mengatur identifikasi biaya lingkungan; dengan demikian, identifikasi ini bergantung pada Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Data Keuangan, yang berlaku secara universal. Biaya yang dikeluarkan dikategorikan menjadi tiga posisi berikut: Penyajian Data Keuangan. Dengan demikian ada tiga posisi untuk biaya yang dikeluarkan yaitu sebagai berikut:

##### a. Sebagai Aset

Persyaratan berikut harus dipenuhi agar sesuatu dapat diidentifikasi sebagai aset:

- a) Berpotensi menghasilkan pendapatan di masa depan.
- b) Memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur secara akurat.

##### b. Menjadi Halangan

Biaya yang teridentifikasi sebagai beban, memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Timbulnya kewajiban
- b) Terjadinya konsumsi aset
- c) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

##### c. Sebagai belanja

Pengeluaran adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan setiap pembayaran yang dilakukan dari rekening kas umum negara bagian atau wilayah yang mengurangi anggaran surplus selama tahun fiskal yang berlaku dan yang tidak akan dikompensasi oleh pemerintah. Ini adalah pengeluaran yang telah dikeluarkan dan dikategorikan seperti itu menurut standar bahwa pembayaran tersebut berasal dari rekening kas umum negara bagian atau wilayah, atau dari organisasi yang berwenang.

##### 2) Pengukuran

Pengukuran dalam akuntansi adalah jembatan antara peristiwa dengan angka, memungkinkan kita untuk memahami dan mencatat apa yang terjadi dalam Perusahaan [13]. menggambarkan pengukuran sebagai pemberian makna numerik pada suatu objek. Perusahaan biasanya menggunakan satuan moneter untuk menilai biaya pengelolaan lingkungan, dengan merujuk pada biaya periode sebelumnya. Pengukuran juga melibatkan penentuan nilai rupiah yang dialokasikan pada objek transaksi keuangan, yang kemudian didokumentasikan sebagai dasar penyusunan data keuangan. Suwardjono [14] menekankan pentingnya penentuan nilai rupiah awal saat transaksi terjadi. KDPPLK (Revisi 2015) menyediakan beberapa basis pengukuran yaitu:

##### a. Biaya Historis

Jumlah total uang yang dibelanjakan oleh suatu bisnis atau nilai wajar yang diperoleh bisnis saat membeli aset tersebut disebut sebagai asetnya.

##### b. Biaya Kini

Ketika aset yang serupa atau identik dibeli pada saat yang sama, nilainya ditentukan dengan membandingkannya dengan uang tunai atau setara kas.

##### c. Nilai realisasi/penyelesaian

Aset didefinisikan sebagai seluruh uang tunai atau setara kas yang akan diperoleh setelah penjualan aset selama pelepasan konvensional.

##### d. Nilai sekarang

Aset menunjukkan seluruh arus kas bersih yang diprediksi di masa mendatang, didiskontokan ke nilai sekarang, yang diproyeksikan memberikan hasil dalam operasi bisnis.

### 3) Pengakuan

Proses penentuan apakah suatu pos memenuhi persyaratan suatu unsur disebut pengakuan, menurut Kerangka Kerja Penyusunan dan Penyajian Data Keuangan (KDPPLK) dan diakui dalam data keuangan. Pengakuan juga mengacu pada dokumentasi formal, atau jurnalisisasi dari nilai moneter atau jumlah uang dari hasil pengukuran dalam sistem akuntansi yang berdampak pada pos dan dipublikasikan dalam data keuangan [14].

#### 3) Penyajian

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suwardjono [14], Pendekatan penyajian data keuangan dimaksudkan untuk membuat berbagai bagian informasi keuangan lebih bermanfaat. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah dan Standar Akuntansi Keuangan, aset diungkapkan dalam Laporan Posisi Keuangan, yang sering dikenal sebagai Neraca. Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah, biaya dimasukkan dalam Data Operasional, sedangkan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan, biaya dimasukkan dalam Laporan Laba Rugi dan Pendapatan Komprehensif Lainnya. Standar Akuntansi Keuangan tidak mengklasifikasikan biaya sebagai pengeluaran, namun Standar Akuntansi Pemerintah menyatakan bahwa biaya yang diberi label sebagai pengeluaran harus dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

### 4) Pengungkapan

Tahap akhir dari proses akuntansi adalah pengungkapan, yang berarti bahwa informasi keuangan harus tetap transparan dan tidak disembunyikan. Prosedur pengungkapan menekankan kegunaan data keuangan yang dihasilkan oleh organisasi [15].

Pengungkapan menandakan tidak adanya penyembunyian atau pengaburan dari publik [13]. Pengungkapan dalam akuntansi lingkungan merupakan bentuk pengungkapan sukarela. Pengungkapan akuntansi lingkungan mengacu pada penyebaran data akuntansi lingkungan dari perspektif internal akuntansi lingkungan, yaitu dalam bentuk data akuntansi

lingkungan. Data tersebut harus mencerminkan keadaan terkini suatu perusahaan atau entitas lainnya. Penting untuk menjelaskan ketentuan penerbitan data akuntansi lingkungan eksternal, sehingga para pemangku kepentingan dapat memahami konsistensi data tersebut [10].

## 3. METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini “Rumah Sakit Umum Daerah H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara”.

### Jenis Penelitian

Teknik deskriptif digunakan dalam proses penelitian kualitatif.

### Informan Penelitian

Informan Dalam Penelitian Ini Yaitu Staff Bagian Kesehatan Lingkungan, Staff Bagian Perencanaan Dan Staff Bagian Keuangan.

### Jenis dan Sumber Data.

Data primer dari wawancara dan data sekunder dari catatan keuangan rumah sakit digunakan dalam penelitian ini.

### Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mencakup tiga jenis metodologi pengumpulan data, yaitu:

- 1) Observasi Langsung
- 2) Wawancara dengan Data Kualitatif
- 3) Catatan berkualitas tinggi

### Teknik Analisis Data

Metodologi analisis data didasarkan pada kerangka kerja yang ditetapkan Miles dan Huberman (1984), meliputi:

- 1) Reduksi Data (Data Reduction)
- 2) Penyajian Data (Data Display)
- 3) Penarikan Kesimpulan & Verifikasi (Conclusion Drawing & Verification).

## 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

RSUD H.M. Djafar Harun di Kabupaten Kolaka Utara menghasilkan sampah dalam kegiatan operasionalnya, yang terbagi menjadi dua jenis: sampah padat dan sampah cair. Kedua jenis sampah ini tentu saja memerlukan teknik pengolahan yang berbeda. Rumah sakit mengelola sampah cair melalui Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang meliputi bak pemisah, tangki aerasi, tangki sedimentasi

akhir, dan tangki sedimentasi awal, bak klorinasi, dan bak pengering lumpur. Rumah sakit mengelola sampah padat, kemudian menyalurkan sampah olahan tersebut ke perusahaan ketiga, Mitra Hijau. Rumah sakit mengalokasikan anggaran tahunan Rp. 465.200.000 untuk inisiatif pengelolaan lingkungan.

## 2. Pembahasan

Perlakuan akuntansi biaya lingkungan pada RSUD H.M. Djafar Harun meliputi Identifikasi, Pengukuran, Pengakuan, Penyajian, dan Pengungkapan berikut:

### 1) Identifikasi

Merujuk pada data tanya jawab penelitian dan analisis data sekunder, termasuk data keuangan RSUD H.M. Djafar Harun, pihaknya telah mengalokasikan dana pengelolaan lingkungan untuk menanggulangi dampak negatif dari kegiatan operasionalnya, khususnya terkait pengelolaan limbah. RSUD H.M. Djafar Harun telah mengalokasikan anggaran tahunan sebesar Rp. 465.200.000,00 untuk biaya lingkungan. Unsur-unsur biaya wilayah yang dihasilkan bagi rumah sakit yang dimaksud tergolong biaya operasional, yang selanjutnya akan dituangkan dalam Data Operasional dan Data Realisasi Anggaran. Hal ini disebabkan belum adanya Standar Akuntansi Pemerintah yang mengatur tentang penanganan akuntansi biaya lingkungan. Rumah sakit wajib mematuhi PSAP dalam menyampaikan data keuangan.

Tidak adanya standar yang ditetapkan untuk biaya lingkungan, sehingga kriteria pengakuan biaya tersebut berbeda-beda di antara perusahaan. Hansen dan Mowen [16] membagi biaya lingkungan menjadi tiga kategori: pencegahan, kegagalan internal, dan kegagalan eksternal. Rumah Sakit Daerah H.M. Djafar Harun, dalam penerapannya, mengklasifikasikan biaya lingkungan sebagai berikut:

- a. Biaya Cleaning Service
- b. Biaya Pengangkutan Limbah Medis
- c. Biaya Uji Air Limbah
- d. Biaya Retribusi sampah/Iuran sampah

### 2) Pengukuran

Kerangka konseptual untuk akuntansi pemerintahan mendefinisikan pengukuran sebagai tindakan untuk menentukan berapa

nilai uang setiap item untuk mengidentifikasi dan memasukkannya dalam data keuangan (Paragraf 98). Rumah Sakit Daerah H.M. Djafar Harun menggunakan mata uang rupiah untuk penilaian biaya historis untuk menilai biaya lingkungan. Hal ini sejalan dengan paragraf 98 dan 99 kerangka konseptual akuntansi pemerintah.

### 3) Pengakuan

Keputusan apakah suatu transaksi akan dicatat sesuai dengan standar akuntansi dan mempengaruhi data keuangan dikenal sebagai pengakuan. Rumah Sakit Daerah H.M. Djafar Harun menganggap pengeluaran lingkungan sebagai biaya produk dan layanan, mengakui biaya ini setelah terjadinya transaksi keluar, berdasarkan hasil wawancara dan analisis data sekunder dari catatan keuangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan yang diuraikan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAP) 02 tentang Data Realisasi Anggaran, di mana paragraf 31 mengartikulasikan bahwa "Pengeluaran diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah."

Menurut paragraf 85 kerangka konseptual akuntansi pemerintahan, beberapa kondisi minimum harus dipenuhi agar suatu kejadian atau insiden dapat diakui. Kriteria yang dipertimbangkan berikut:

- a. Kemungkinan besar keuntungan ekonomi yang terkait dengan peristiwa atau kejadian tersebut akan ditransfer ke atau dari perusahaan pelapor.
- b. Peristiwa atau kejadian tersebut memiliki nilai atau biaya yang dapat diukur atau dinilai secara akurat.

### 4) Penyajian

Suatu transaksi yang dilaporkan dalam data keuangan disebut dengan penyajian. Biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh RSUD H.M. Djafar Harun disajikan dalam mata uang rupiah Indonesia secara lengkap, yang dihitung secara akrual menggunakan teknik biaya historis. Data operasional dan data realisasi anggaran memuat biaya lingkungan tersebut beserta komponen biaya terkait lainnya.

PSAP 01, Paragraf 14, mendefinisikan satu set data keuangan lengkap yang mencakup data keuangan dan data realisasi anggaran. Bagian-bagiannya meliputi: data realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran surplus,

neraca, data operasional, data arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas data keuangan. Haryono [17] mengusulkan empat model alternatif untuk penyajian biaya lingkungan: Model alternatif, model hijau, model intensif ekologis, dan model aset nasional. Tabel berikut ini membandingkan penyajian biaya lingkungan di RSUD H.M. Djafar Harun dengan model-model tersebut, berdasarkan Haryono dan PSAP:

Tabel 2 Perbandingan penyajian data keuangan menurut RSUD H.M. Djafar Harun, Haryono dan PSAP

Menurut RSUD H.M. Djafar Harun	Penyajian Menurut Haryono	Penyajian Menurut PSAP
Penyajian biaya lingkungan pada RSUD H.M. Djafar Harun disajikan bersama-sama dengan biaya-biaya yang lain yang sejenis dalam: 1) Akun Belanja barang dan jasa 2) Biaya Cleaning Service 3) Biaya Pengangkutan Limbah 4) Biaya Retribusi Sampah/luran Sampah 5) Biaya Uji Air Limbah	1) Model Normatif: mengakui dan mencatat item-item biaya lingkungan dalam satu rekening umum bersama dengan rekening lain yang serumpul 2) Model Hijau: menetapkan biaya dan manfaat tertentu demi terciptanya lingkungan bersih, kemudian melaporkannya dalam laporan keuangan khusus untuk pembiayaan lingkungan. 3) Model intensif lingkungan: biaya lingkungan disajikan sebagai investasi atas lingkungan dan aset untuk aktivitas lingkungan tidak disusutkan. 4) Model aset nasional: entitas harus menginterpretasikan pembiayaan lingkungan sebagai bentuk tanggungjawab nasional.	<b>PSAP 01</b> Paragraf 93: "untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, entitas pelaporan dapat dianalisis menurut klasifikasi ekonomi atau klasifikasi fungsi/program dalam hubungannya dengan laporan keuangan.  Paragraf 94: "penambahan pos-pos pada laporan operasional dan deskripsi yang digunakan serta susunan pos-pos dapat diubah apabila diperlukan untuk menjelaskan operasi dimaksud. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan meliputi materialitas, dan sifat serta fungsi komponen pendapatan-LO dan beban.  <b>PSAP 02</b>  Paragraf 34: "Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis)

4) Pengungkapan

Berikut adalah tabel perbandingan antara pengungkapan menurut RSUD H.M. Djafar Harun serta berdasarkan PSAP 04:

Tabel 3 Perbandingan pengungkapan menurut RSUD H.M Djafar Harun dan Menurut PSAP 04

Pengungkapan Menurut RSUD H.M. Djafar Harun	Pengungkapan Menurut PSAP 04
Biaya lingkungan yang dikeluarkan oleh RSUD H.M. Djafar Harun dalam CALK diungkapkan pada bagian: Laporan Realisasi Anggaran 1) Dalam pos belanja barang dan jasa Laporan Operasional 2) Dalam pos beban yang diklasifikasikan ke dalam beban barang dan jasa.	Menurut paragraf 14 PSAP tentang catatan atas laporan keuangan menyebutkan bahwa dalam rangka pengungkapan yang memadai, catatan atas laporan keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: 3) Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi 4) Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro 5) Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target 6) Informasi tentang dasar penyajian laporan keuangan dan kebijakan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya. 7) Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan 8) Informasi yang diharuskan oleh pernyataan oleh pernyataan standar akuntansi pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan 9) Dan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengungkapan biaya wi;ayah RSUD H.M. Djafar Harun terhadap Catatan atas Data keungan (CALK) tidak sesuai dengan paragraf 14 PSAP 04 tentang CALK yang menyatakan bahwa CALK harus mengungkapkan informasi yang belum dijelaskan dalam data keuangan. Namun RSUD H.M. Djafar Harun mengungkapkan biaya lingkungan dalam pos yang lebih besar tanpa memberikan penjelasan yang rinci, akibatnya, penelusuran biaya lingkungan dalam CALK sulit untuk dilakukan.

Meskipun pengungkapan biaya lingkungan masih termasuk dalam pengungkapan yang sukarela, Rumah sakit dapat memperoleh manfaat dari pengungkapan informasi tentang biaya lingkungan. Pengguna data keuangan akan merasa lebih mudah melacak biaya lingkungan dengan bantuan informasi tersebut. Selain itu, memberikan rincian biaya lingkungan yang lebih menyeluruh kepada para pemangku kepentingan akan membantu mereka membuat keputusan yang bijaksana.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian serta pembahasan yang telah

dilakukan di RSUD H.M. Djafar Harun Kabupaten Kolaka Utara, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Rumah Sakit Umum H.M. Djafar Harun dalam hal penerapan akuntansi lingkungan, sudah diterapkan dengan baik yang mana pihak rumah sakit sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp.465.200.000/ Tahun untuk biaya lingkungan.
- 2) Rumah Sakit Umum H.M. Djafar Harun dalam mengidentifikasi biaya lingkungan diidentifikasi sebagai biaya Cleaning Service, Biaya Pengangkutan Limbah, Biaya Uji Air Limbah dan Biaya Retribusi sampah/iuran sampah.
- 3) Rumah Sakit Umum H.M. Djafar Harun dalam hal pengukuran, pihak rumah sakit mengukur biaya lingkungan menggunakan biaya Historis dengan menggunakan satuan uang rupiah .
- 4) Biaya lingkungan diakui oleh RSUD H.M. Djafar Harun sebagai beban untuk produk dan layanan, dan biaya tersebut diakui pada saat transaksi arus kas keluar. Untuk tujuan akuntansi pos pengeluaran lingkungan yang termasuk dalam data operasi, rumah sakit menggunakan pendekatan akrual. Namun, untuk pos biaya lingkungan dalam data realisasi anggaran, digunakan prosedur terpisah yang digunakan adalah cash basic.
- 5) Rumah Sakit Umum H.M. Djafar Harun menggunakan pendekatan biaya historis untuk menghasilkan biaya lingkungan secara akrual, yang disajikan secara penuh dalam mata uang Rupiah. Data realisasi anggaran mencakup biaya lingkungan ini dan data operasional bersama-sama dengan komponen biaya lain yang serumpun.
- 6) Dalam hal pengungkapan Rumah Sakit Umum H.M. Djafar Harun terus berupaya sebaik mungkin untuk mengungkapkannya yang mana belum ada standar yang ditetapkan untuk

mengungkapkan biaya lingkungan secara jelas dan komprehensif dalam data keuangan dan catatan atas data keuangan (CALK). Oleh karena itu, rumah sakit telah memutuskan untuk memasukkan biaya lingkungan ini dalam kategori yang lebih umum saat melaporkan pengeluarannya, khususnya di bawah judul barang dan jasa.

## 6. SARAN

Peneliti dapat memberikan saran-saran berikut berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di RSUD H.M. Djafar Harun:

1. Bagi RSUD H.M. Djafar Harun
  - a. RSUD H.M. Djafar Harun diharapkan dapat lebih tepat mengidentifikasi biaya-biaya lingkungan yang timbul dari kegiatan operasionalnya, sehingga para pemangku kepentingan dapat lebih mudah melacak pengeluaran-pengeluaran lingkungan yang telah dikeluarkan perusahaan.
  - b. Diharapkan beban lingkungan hidup akan disajikan secara terpisah oleh RSUD H.M. Djafar Harun dan akan memiliki akun tersendiri. Strategi ini akan memudahkan penyediaan data yang dibutuhkan untuk operasi pengendalian mutu lingkungan hidup. Pada akhirnya, beban yang terkait dengan lingkungan hidup dapat menjadi dasar untuk meningkatkan akuntabilitas dan standar lingkungan rumah sakit.
2. Diharapkan di masa mendatang, akademisi akan menetapkan pedoman yang tepat tentang prosedur akuntansi lingkungan, yang akan memudahkan perbandingan dan menghasilkan data yang lebih jelas. Selain itu, karena penelitian ini hanya membahas masalah akuntansi keuangan, disarankan untuk memperluas penelitian dengan menyertakan sudut pandang manajerial.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. Langelo, "Analisis Perlakuan Akuntansi Biaya Lingkungan (Studi Pada Cv. Ken Jaya Perkasa Di Kota Bitung)," *Paulus J. Account.*, vol. 3, no. 2, pp. 30–41, 2022.
- [2] D. Z. Radi, "Analisis Perlakuan Akuntansi Biaya Lingkungan Pada PT. DMC PLASTIK INDONESIA-TULUNGAGUNG." Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, 2021.
- [3] M. Ariani, Zulhawati, and D. Dermawan, "Penerapan akuntansi lingkungan pada pengelolaan limbah rumah sakit," *J. Ilmu Komun. dan Hum.*, 2021.
- [4] B. P. Statistik, "Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2023."
- [5] S. Pricilia and L. Susanto, "Pengaruh kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, dan ukuran dewan komisaris terhadap manajemen laba serta implikasinya terhadap kinerja keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia periode 201," *J. Ekon.*, vol. 22, no. 2, 2017.
- [6] C. Megananda, "Perlakuan Akuntansi atas Biaya Lingkungan pada RS Perkebunan dan RSUD Balung di Kabupaten Jember: Pendekatan Observasional," *J. Ekon. Akunt. dan Manaj.*, vol. 18, no. 1, pp. 22–38, 2019.
- [7] M. Ghozali, E. Yudianti, and I. Purwasih, "Hubungan intensitas mengakses situs pornografi dan perilaku seksual pranikah pada siswa SMK nurul iman Palembang," *Indones. J. Behav. Stud.*, vol. 1, no. 2, 2021.
- [8] J. Gasperz and D. Kriswantini, "MENGUNGKAP PENERAPAN AKUNTANSI LINGKUNGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA AMBON," *J. Akunt.*, vol. 7, no. 1, pp. 1–16, 2021.
- [9] S. M. Ani, A. Chariri, and I. Ghazali, "The Existence of Independent Commissioners and Board Remunerations in Achieving Firm Value," in *International Conference On Research And Development (ICORAD)*, 2022, pp. 99–107.
- [10] R. Abdullah, M. Mardiana, F. A. Jabu, and W. Salim, "Pentingnya Profesi Akuntan Dalam Pengembangan Laporan Keuangan Desa," *J. Valuasi J. Ilm. Ilmu Manaj. dan Kewirausahaan*, vol. 1, no. 2, pp. 545–566, 2021.
- [11] A. Ikhsan, "Akuntansi lingkungan dan pengungkapannya," *Yogyakarta Graha Ilmu*, 2008.
- [12] D. R. Hansen and M. M. Mowen, "Managerial Accounting: Akuntansi Manajerial Buku 2," 2009.
- [13] I. Kusumawati and H.-W. Huang, "Key factors for successful management of marine protected areas: A comparison of stakeholders' perception of two MPAs in Weh island, Sabang, Aceh, Indonesia," *Mar. Policy*, vol. 51, pp. 465–475, 2015.
- [14] T. A. Suwardjono, "Perekayasaan Pelaporan Keuangan," *Yogyakarta Bpfe*, 2005.
- [15] M. Ardiana and D. Ervina, "Perlakuan Akuntansi Biaya Lingkungan," in *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)*, 2021.
- [16] D. R. Hansen and M. M. Mowen, "Managerial Accounting: Akuntansi Manajerial Buku 1 Edisi 8," *Jakarta: Salemba Empat*, 2012.
- [17] S. Sauri, A. T. Haryono, I. F. Astuti, D. M. Khairina, and D. Cahyadi, "Sistem Informasi Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Sepakbola Universitas Mulawarman Berbasis Web," *J. Inform. Mulawarman*, vol. 10, no. 2, pp. 46–50, 2015.

